

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Analisis pemahaman pengurus barang dan kepala sekolah/UPTD berada pada kategori Tidak Paham (TP) dengan nilai 48,05 dari kategori penuh 100.
2. Terhadap permasalahan, kelemahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penatausahaan aset tetap di sekolah dan UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan, didapatkan simpulan sebagai berikut:
 - a. Jabatan pengurus barang adalah jabatan yang terabaikan atau terpinggirkan dan dipandang sebagai jabatan yang tidak favorit dan tidak bergengsi dan bahkan dihindari karena tuntutan kerja yang banyak dan sama rumitnya dengan jabatan yang bergengsi.
 - b. Terdapat perbedaan pencatatan dan penyajian aset tetap menurut Buku Inventaris Sekolah dibandingkan dengan pencatatan dan penyajian Buku Inventaris Dinas Pendidikan.
 - c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman pengurus barang dan Kepala Sekolah/UPTD mengenai penatausahaan aset tetap yang diuji adalah tujuh (7) variabel. Hasil analisis dan penelitian atas ketujuh variabel ini menunjukkan bahwa dua variabel yaitu perbedaan pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, dan latar belakang pendidikan yang memberikan pengaruh terhadap pemahaman responden (pengurus barang dan kepala sekolah/UPTD) mengenai penatausahaan aset tetap sedangkan 5 variabel lainnya yaitu perbedaan jenis kelamin, umur responden, masa kerja, pendidikan terakhir, dan jabatan ternyata tidak memberikan pengaruh terhadap pemahaman responden (pengurus barang dan kepala sekolah/UPTD) mengenai penatausahaan aset tetap.

B. Saran Penelitian

Untuk mengatasi ketidakpahaman pengurus barang dan kepala sekolah/UPTD mengenai penatausahaan aset tetap, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk:

1. Memperbaiki dan memperdalam pertanyaan kuesioner agar penelitian lebih mampu mengungkap masalah, terutama terkait dengan faktor umur, jabatan, rangkap jabatan, jenis kelamin dan masa kerja, dan lain-lain.
2. Memperdalam dan mempertajam pertanyaan sehubungan dengan terjadinya masa transisi atas perubahan paradigma dan aturan dari Permendagri 17 Tahun 2007 kepada Permendagri 19 Tahun 2016.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini ditemukan kelemahan antara lain:

1. Data dukung berupa Buku Inventaris atau Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Pendidikan dan Buku Inventaris atau Kartu Inventaris Barang (KIB) sekolah-sekolah yang direncanakan diperoleh untuk 3 tahun yaitu Tahun 2014, 2015 dan 2016, namun data Tahun 2016 tidak bisa diperoleh. Hal ini terjadi karena data dukung Tahun 2016 sedang dalam proses rekonsiliasi antara Dinas Pendidikan dengan Bagian Aset Badan Keuangan Daerah Kota Solok untuk pemenuhan data dukung dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2016 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), sehingga data yang tersebut tidak bisa diyakini karena belum merupakan hasil rekonsiliasi.
2. Dari seluruh responden berjumlah 114 orang hanya 90 responden yang bisa berpartisipasi dalam penelitian ini.